



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : DEWAN KOMISARIS

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : CHARLES SITORUS
2. Jabatan : KOMISARIS INDEPENDEN PT PLN (PERSERO)
3. NHK : 216589

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 15.078.455.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m2/292 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.064.455.000
2. Bangunan Seluas 169 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 10.200.000.000
3. Tanah Seluas 1056 m2 di KAB / KOTA TOBA SAMOSIR, WARISAN Rp. 25.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 75.56 m2/66.67 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.789.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 1.467.443.000

1. MOBIL, TOYOTA ALL NEW HRV 1.5 E CVT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV PRESTIGE TURBO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2,8 VR2 GR SPORT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 592.443.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 3.989.091.700

**D. SURAT BERTAHAGA**

Rp. 997.196.203

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 2.562.769.139

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. 898.577.280

**Sub Total**

Rp. 24.993.532.322



III. HUTANG

Rp.

6.885.053.541

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

18.108.478.781

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.